



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA DISNAKERTRANSDUK PROV. JAWA TIMUR

Untuk mewujudkan agenda dan prioritas pembangunan di Jawa Timur berdasarkan visi, misi dan agenda pokok pembangunan Jawa Timur, maka ditetapkan **Visi Disnakertransduk Prov. Jawa Timur** :

“Terwujudnya Tenaga Kerja yang Berdaya Saing dan Harmonis, Masyarakat Transmigrasi yang Mandiri dan Administrasi Kependudukan yang Profesional”.

Untuk mencapai visi tersebut, disusun **Misi Disnakertransduk Prov. Jawa Timur** sebagai berikut :

1. Membina dan mengembangkan keterampilan/kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja.
2. Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja untuk mengisi peluang kerja di dalam dan ke luar negeri, serta memperluas kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi daerah untuk meningkatkan kemandirian kerja.
3. Meningkatkan pengawasan, perlindungan ketenagakerjaan dan pembinaan hubungan industrial untuk mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.
4. Memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi, serta mewujudkan masyarakat transmigrasi yang mandiri.
5. Memfasilitasi hak-hak dasar kependudukan melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan yang profesional.



Tujuan :

Di Bidang Ketenagakerjaan :

1. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri.
2. Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, serta pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri.
3. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, serta pengawasan norma ketenagakerjaan, K3 dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh.

Di Bidang Ketrasmigrasian :

4. Mewujudkan transmigran yang mandiri dan berkualitas di pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan.

Di Bidang Kependudukan :

5. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan.

Tabel 2.1
Matriks Hubungan Antara Misi dan Tujuan

| NO | MISI | TUJUAN | INDIKATOR |
|----|---|---|--|
| 1. | Membina dan mengembangkan keterampilan/kompetensi dan produktivitas tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja. | Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri. | <ol style="list-style-type: none">1. % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi.2. % peningkatan tenaga kerja magang dalam negeri3. % tenaga kerja magang ke luar negeri4. % pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas |



| NO | MISI | TUJUAN | INDIKATOR |
|----|---|--|--|
| 2. | Meningkatkan pelayanan penempatan tenaga kerja untuk mengisi peluang kerja di dalam dan ke luar negeri, serta memperluas kesempatan kerja melalui pemberdayaan potensi daerah untuk meningkatkan kemandirian kerja. | Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, serta pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri. | 1. % pencari kerja yang ditempatkan melalui AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara). 2. % peningkatan jejaring informasi lowongan kerja Rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sektor informal. |
| 3. | Meningkatkan pengawasan, perlindungan ketenagakerjaan dan pembinaan hubungan industrial untuk mewujudkan iklim ketenagakerjaan yang kondusif. | Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, serta pengawasan norma ketenagakerjaan, K3 dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/ buruh. | 1. % penurunan kasus perselisihan hubungan industrial (yang masuk ke pengadilan hubungan industrial). 2. % penurunan kasus ketenagakerjaan. |
| 4. | Memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi, serta mewujudkan masyarakat transmigrasi yang mandiri. | Mewujudkan transmigran yang mandiri dan berkualitas di pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan. | % transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (Kepala Keluarga). |
| 5. | Memfasilitasi hak-hak dasar kependudukan melalui penyelenggaraan administrasi kependudukan yang profesional. | Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan. | % data penduduk yang akurat. |

Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama :

Di Bidang Ketenagakerjaan :

1. Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja. *Indikator kinerja utamanya* adalah (a) persentase lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi, (b) persentase peningkatan tenaga kerja magang dalam negeri, (c) persentase tenaga kerja magang ke luar negeri, dan (d) persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas.
2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal. *Indikator kinerja utamanya* adalah (a) persentase pencari kerja yang ditempatkan, (b) persentase peningkatan jejaring informasi lowongan



- kerja melalui perusahaan anggota aktif PLKT (Pusat Layanan Karir Terpadu), (c) persentase Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan pada jabatan formal, dan (d) Rasio penyerapan tenaga kerja baru dari binaan di sektor informal.
3. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja. *Indikator kinerja utamanya* adalah (a) persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama, dan (b) persentase upah minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
 4. Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja/buruh. *Indikator kinerja utamanya* adalah (a) persentase pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani, dan (b) persentase penurunan kasus kecelakaan kerja.

Di Bidang Ketransmigrasian :

5. Meningkatnya penempatan transmigran yang berkualitas dan kemandirian transmigran. *Indikator kinerja utamanya* adalah (a) persentase penempatan transmigran yang telah mendapatkan pelatihan (Kepala Keluarga), dan (b) persentase transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (Kepala Keluarga).

Di Bidang Kependudukan :

6. Meningkatnya akurasi data penduduk. *Indikator kinerja utamanya* adalah persentase data penduduk yang akurat.

Tabel 2.2
Matriks Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran

| TUJUAN | | SASARAN | |
|--|--|--|---|
| URAIAN | INDIKATOR | URAIAN | INDIKATOR |
| 1. Mewujudkan tenaga kerja yang terampil/kompeten dan produktif untuk mengisi kesempatan kerja di dalam dan luar negeri. | % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi. | Meningkatnya keterampilan/kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja. | 1. % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan/kompetensi. 2. % peningkatan tenaga kerja yang dimagang-kerjakan : |



| TUJUAN | | SASARAN | |
|---|--|---|--|
| URAIAN | INDIKATOR | URAIAN | INDIKATOR |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - % peningkatan tenaga kerja magang dalam negeri. - % tenaga kerja magang ke luar negeri. <p>3. % pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas.</p> |
| 2 Mewujudkan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri, serta pengembangan kesempatan kerja melalui usaha mandiri. | <ol style="list-style-type: none"> 1. % pencari kerja yang ditempatkan melalui AKL (Antar Kerja Lokal), AKAD (Antar Kerja Antar Daerah), dan AKAN (Antar Kerja Antar Negara). 2. Rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sektor informal. | Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal. | <ol style="list-style-type: none"> 1. % pencari kerja yang ditempatkan. 2. % peningkatan jejaring informasi lowongan kerja melalui perusahaan anggota aktif PLKT (Pusat Layanan Karir Terpadu). 3. % Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan pada jabatan formal. 4. Rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sektor informal. |
| 3 Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif, serta pengawasan norma ketenagakerjaan, K3 dan peningkatan perlindungan hak-hak dasar pekerja/buruh. | % penurunan kasus perselisihan hubungan industrial (yang masuk ke pengadilan hubungan industrial). | Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja. | <ol style="list-style-type: none"> 1. % kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama. 2. % Upah minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL). |
| | % penurunan kasus ketenagakerjaan. | Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja/buruh. | <ol style="list-style-type: none"> 1. % pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani. 2. % penurunan kasus kecelakaan kerja. |



| TUJUAN | | SASARAN | |
|--|---|--|--|
| URAIAN | INDIKATOR | URAIAN | INDIKATOR |
| 4 Mewujudkan transmigran yang mandiri dan berkualitas di pemukiman transmigrasi yang layak huni, layak usaha, layak berkembang dan layak lingkungan. | % transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (Kepala Keluarga). | Meningkatnya penempatan transmigran yang berkualitas dan kemandirian transmigran | 1. % penempatan transmigran yang telah mendapat pelatihan (Kepala Keluarga). 2. % transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (Kepala Keluarga). |
| 5 Mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan. | % data penduduk yang akurat. | Meningkatnya akurasi data penduduk. | % data penduduk yang akurat. |

2.2. PROGRAM PRIORITAS

Pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan diwujudkan melalui 6 (enam) program prioritas utama beserta implementasi kegiatannya, yang meliputi :

a. Bidang Ketenagakerjaan

Terdiri dari 4 (empat) program prioritas, yakni :

1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Untuk mendorong pembentukan tenaga kerja yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja, serta mengisi lapangan kerja di dalam maupun luar negeri melalui peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi penyelenggaraan pelatihan di UPT Pelatihan Kerja yang akan ditingkatkan dan bertaraf internasional. Implementasi kegiatannya berupa :



- (1) Pengembangan standar kompetensi kerja dan pemberdayaan SDM kepelatihan dan instruktur.
- (2) Pengembangan kelembagaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
- (3) Pengembangan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja dan pemagangan.
- (4) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka revitalisasi lembaga pelatihan dan penyelenggaraan pelatihan berbasis masyarakat.
- (5) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi.
- (6) Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau.
- (7) Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat dilingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
- (8) Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industry hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.
- (9) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka revitalisasi dan pengembangan kelembagaan produktivitas.
- (10) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan pembinaan produktifitas.

2) Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja.

Untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja baik di sektor formal maupun sektor informal secara remuneratif, produktif, layak dan sejahtera, baik di dalam maupun di luar negeri, serta mendorong



peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri. Implementasi kegiatannya berupa :

- (1) Perluasan kesempatan kerja.
- (2) Fasilitasi dan pembinaan penempatan tenaga kerja luar negeri.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
- (4) Fasilitasi kegiatan pendukung pasar kerja melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas informasi pasar kerja dan penyelenggaraan bursa kerja di dalam dan luar negeri.
- (5) Penguatan kapasitas SDM antar kerja untuk mengoptimalkan pendayagunaan dan penempatan tenaga kerja di dalam dan luar negeri.
- (6) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka revitalisasi dan pengembangan kelembagaan, perlindungan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
- (7) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan pelatihan bagi Tenaga Kerja Indonesia

3) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja.

Untuk perbaikan syarat kerja dan sistem pengupahan, pemberdayaan lembaga hubungan industrial serta fasilitasi penyelesaian perselisihan dan pembinaan hubungan industrial. Implementasi kegiatannya berupa:

- (1) Pembinaan syarat kerja dan kesejahteraan pekerja.
- (2) Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- (3) Peningkatan fungsi kelembagaan ketenagakerjaan.
- (4) Penguatan kapasitas SDM hubungan industrial untuk mendorong terwujudnya iklim hubungan industrial yang kondusif.



4) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Untuk peningkatan profesionalisme tenaga pengawas ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja perempuan, tenaga kerja anak, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja. Implementasi kegiatannya berupa :

- (1) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum norma ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
- (3) Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengawasan ketenagakerjaan.
- (4) Fasilitasi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak dan perlindungan terhadap pekerja perempuan.
- (5) Pendidikan masyarakat produktif dalam rangka penyelenggaraan pelatihan di bidang hiperkes dan keselamatan kerja di UPT K3 Surabaya.
- (6) Pengkondisian lingkungan kerja yang aman, nyaman dan selamat serta tenaga kerja yang sehat dan produktif di UPT K3 Surabaya.
- (7) Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) di UPT K3 Surabaya.
- (8) Pendidikan masyarakat produktif dalam rangka revitalisasi dan pengembangan kelembagaan di Bidang Hiperkes dan Keselamatan Kerja di UPT K3 Surabaya.

b. Bidang Ketransmigrasian.

5) Program Ketransmigrasian.

1. Untuk mendapatkan animo calon transmigran yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dan keahlian yang dibutuhkan guna pengembangan dan pelaksanaan kegiatan di daerah penempatan.



2. Untuk menjembatani kepentingan daerah asal (pengirim) maupun daerah tujuan (penerima) yang tertuang dalam perjanjian formal (*MoU*).

Implementasi kegiatannya berupa :

- (1) Fasilitasi perpindahan dan penempatan penduduk ke Luar Jawa.
- (2) Optimalisasi penempatan calon transmigran.
- (3) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka revitalisasi lembaga pelatihan di UPT Pelatihan Kependudukan Balong Bendo.
- (4) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan pelatihan bagi penduduk potensial di UPT Pelatihan Kependudukan Balong Bendo.
- (5) Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau di UPT Pelatihan kependudukan Balong Bendo.

c. Bidang Kependudukan.

6) Program Penataan Administrasi Kependudukan.

1. Untuk mendorong terakomodasinya hak-hak setiap penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan dan meningkatkan kuantitas kepemilikan dokumen kependudukan, mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan pelayanan publik.
2. Untuk mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenalan tunggal berupa NIK bagi seluruh penduduk Indonesia, sehingga data penduduk dapat diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan berlaku nasional guna membangun sistem yang mampu menghimpun data kependudukan yang cepat dan akurat serta mengembangkan sarana komunikasi



data, jaringan bank data dengan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal.

Implementasi kegiatannya berupa :

- (1) Penataan administrasi sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- (2) Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAM) terpadu.
- (3) Koordinasi pelaksanaan kebijakan pencatatan sipil dan administrasi kependudukan.

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | TARGET |
|--|---|--|---|--------|
| 1 | Meningkatnya keterampilan / kompetensi tenaga kerja dan produktivitas tenaga kerja. | % lulusan pelatihan yang memiliki keterampilan / kompetensi. | $\frac{\sum \text{lulusan pelatihan yang lulus sertifikasi kompetensi}}{\sum \text{lulusan pelatihan yang mengikuti sertifikasi kompetensi}} \times 100$ <p><i>Ket : Sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) atau BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi)</i></p> | 85,00% |
| | | % peningkatan tenaga kerja yang dimagangkerjakan : | $\frac{\sum \text{calon tenaga kerja yg dimagangkerjakan di dalam negeri thn ini - thn sebelumnya}}{\sum \text{calon tenaga kerja yg dimagangkerjakan di dalam negeri thn sebelumnya}} \times 100$ | 3,00% |
| | | - % peningkatan tenaga kerja magang dalam negeri | | |
| | | - % tenaga kerja magang ke luar negeri | $\frac{\sum \text{calon tenaga kerja yang lulus tes dan dimagangkerjakan ke luar negeri}}{\sum \text{calon tenaga kerja yg mengikuti tes magang kerja ke luar negeri}} \times 100$ | 20,00% |
| - % pertumbuhan produktivitas tenaga kerja yang diberi bimbingan konsultasi produktivitas. | $\frac{\sum \text{produktivitas tenaga kerja setelah bimbingan konsultasi - produktivitas tenaga kerja sebelum bimbingan konsultasi}}{\sum \text{produktivitas tenaga kerja sebelum bimbingan konsultasi}} \times 100$ <p><i>Ket : Produktivitas tenaga kerja = $\frac{\sum \text{omzet penjualan}}{\sum \text{tenaga kerja}}$</i></p> | 33,00% | | |



| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | FORMULA INDIKATOR | TARGET |
|----|---|---|---|---------|
| 2 | Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal. | - % pencari kerja yang ditempatkan. | $\frac{\Sigma \text{ pencari kerja yg ditempatkan}}{\Sigma \text{ pencari kerja yg mendaftar}} \times 100$ | 62,00% |
| | | - % peningkatan jejaring informasi lowongan kerja melalui perusahaan anggota aktif PLKT (Pusat Layanan Karir Terpadu) | $\frac{\Sigma \text{ perusahaan anggota aktif PLKT yg menginformasikan lowongan kerja}}{\Sigma \text{ perusahaan anggota PLKT}} \times 100$ Ket : PLKT : Pusat Layanan Karir Terpadu | 82,00% |
| | | - % Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditempatkan pada jabatan formal | $\frac{\Sigma \text{ TKI yang ditempatkan pada jabatan formal}}{\Sigma \text{ TKI yang ditempatkan}} \times 100$ | 38,00% |
| | | - Rasio penyerapan tenaga kerja dari binaan di sector informal. | Tenaga kerja yang mendapat pembinaan di sektor informal dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja baru yang diserap | 1 : 4 |
| 3 | Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif dan kesejahteraan pekerja. | % kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama. | $\frac{\Sigma \text{ kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (anjaran)}}{\Sigma \text{ kasus yang ada}} \times 100$ | 46,00% |
| | | % upah minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL). | $\frac{\Sigma \text{ rata - rata Upah Minimum Kab./Kota (UMK)}}{\Sigma \text{ rata - rata Kebutuhan Hidup Layak (KHL)}} \times 100$ | 106,00% |
| 4 | Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan, K3 serta perlindungan pekerja / buruh. | - % pelanggaran hukum di bidang morna ketenagakerjaan yang ditangani | $\frac{\Sigma \text{ kasus norma ketenagakerjaan yang ditangani}}{\Sigma \text{ pengaduan yang masuk}} \times 100$ | 83,00% |
| | | - % penurunan kasus kecelakaan kerja. | $\frac{\text{Selisih } \Sigma \text{ kasus kecelakaan kerja tahun ini - tahun sebelumnya}}{\Sigma \text{ kasus kecelakaan kerja tahun sebelumnya}} \times 100$ | 11,00% |
| 5 | Meningkatnya akurasi data penduduk. | % data penduduk yang akurat. | $\frac{\Sigma \text{ penduduk Jatim yang masuk Dalam database kependudukan}}{\Sigma \text{ penduduk Jatim hasil registrasi Kab./Kota}} \times 100$ | 98,79% |
| 6 | Meningkatnya penempatan transmigran yang berkualitas dan kemandirian transmigran. | % penempatan transmigran yang telah mendapatkan pelatihan (Kepala Keluarga). | $\frac{\Sigma \text{ Transmigran yang telah dilatih yang ditempatkan}}{\Sigma \text{ transmigran yang ditempatkan}} \times 100$ | 64,00% |
| | | % transmigran yg berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya (Kepala Keluarga). | $\frac{\Sigma \text{ transmigran yang berhasil meningkatkan taraf ekonomi dan sosialnya}}{\Sigma \text{ transmigran yg ditempatkan pada lokasi tersebut}} \times 100$ Ket. : Kriteria keberhasilan transmigran : - Pendapatan meningkat. - Kondisi tempat tinggal bertambah baik. | 62,00% |